



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661 FAX.3810361
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10110

Jakarta, 26 Oktober 2016

Nomor : ~~781~~ /BUA.4/PL.07/10/2016
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Dokumen RKBMN

Yth,

1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Plt. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Koordinator Wilayah pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia.

Di tempat

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 150/PMK.05/2014, tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018, dengan ini di informasikan terkait RKBMN yang sudah di sampaikan melalui aplikasi *Sistem Informasi Manajemen Aset Negara* (SIMAN) maka sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bahwa dokumen RKBMN tersebut masih harus dilengkapi dengan :

1. RKBMN bentuk hard copy dan sudah di tanda tandangi serta stempel dari masing-masing Pengguna Barang (*Asli*);
2. Untuk *Satker* yang mengajukan Usulan *Pengadaan Rumah Negara* agar dilampirkan data dukung berupa hasil konsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat terkait dengan Pembangunan Rumah Negara.

Mengingat pentingnya data-data tersebut dalam bentuk hardcopy, dengan hormat dimohon agar kelengkapan tersebut segera dikirimkan ke **Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI** paling lambat **tanggal 07 November 2016**. Apabila melewati tanggal tersebut akan dianggap tidak mengajukan RKBMN Tahun Anggaran 2018.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan

Muhamad Ashar

† NIP. 19571223 197902 1 001

Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.